



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Ganjar Jationo, S.E, MAP

Kamis, 17 Juni 2021

Lokasi Acara

Latar Belakang Sosialisasi

Amanat Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pasal 14

Pasal 14

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus, wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum dipergunakan.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
 - a. Dokumen Kebutuhan Aplikasi;
 - b. Dokumen Perancangan Aplikasi;
 - c. Dokumen Manual Penggunaan Aplikasi; dan
 - d. Kode Sumber.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di *Repository*.
- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan **integrasi layanan SPBE yang terdiri dari integrasi pelayanan publik, integrasi administrasi pemerintahan, dan integrasi portal data.**

Namun, dalam pelaksanaannya proses integrasi sulit dilaksanakan karena **belum adanya dokumentasi aplikasi** sehingga sulit untuk memahami alur kerja serta data yang ada pada tiap aplikasi. Oleh sebab itu, akan dilaksanakan sosialisasi dokumentasi aplikasi khusus ini dengan harapan agar **perangkat daerah dapat mulai membuat dan mengumpulkan dokumentasi aplikasi yang sesuai dengan format yang telah disediakan.**

Tujuan Sosialisasi

1. Memberikan pengetahuan kepada perangkat daerah tentang pentingnya pendokumentasian pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi di perangkat daerah
2. Memberikan pemahaman terkait peranan perangkat daerah dalam proses integrasi aplikasi
3. Menjelaskan alur koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi di perangkat daerah

Sasaran Sosialisasi

1. Perangkat Daerah mengetahui pentingnya melakukan pendokumentasian aplikasi
2. Perangkat Daerah mengetahui langkah-langkah pendokumentasian aplikasi
3. Perangkat Daerah mengetahui format dokumen yang harus diserahkan sebagai hasil pengujian dan dokumentasi aplikasi
4. Perangkat Daerah mengetahui peranannya dalam proses integrasi aplikasi
5. Perangkat Daerah mengetahui dan memahami alur koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Lampung

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Definisi

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

Tujuan

Outcome



Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Terwujudnya keamanan informasi pemerintah

Permasalahan Dalam Pengembangan SPBE Secara Nasional

Tercantum dalam Rencana Induk SPBE Nasional

1. Belum adanya **Tata Kelola SPBE** yang terpadu secara nasional
Hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2016 terkait belanja TIK yang tidak efisien :
 - Membangun aplikasi yang sejenis antar instansi Pemerintah
 - Penggunaan Pusat Data yang tidak sesuai kapasitas yang disediakan
2. SPBE belum diterapkan pada **penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik** secara menyeluruh dan optimal
3. Jangkauan **infrastruktur TIK** ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal
4. Keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki **kompetensi teknis TIK**

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020

Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Akan ada sosialisasi terkait Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020

Ruang Lingkup

- Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE
- Data dan Informasi
- Pusat Data
- **Aplikasi**
- Integrasi Sistem Informasi
- Infrastruktur
- Organisasi Manajemen
- Proses SPBE
- Monitoring dan Evaluasi

Aplikasi Umum

Sudah ditetapkan oleh Kementerian PANRB



Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 680 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Telah diterapkan
di Pemerintah Provinsi Lampung

<https://lampung.lapor.go.id>

The screenshot displays the homepage of the LAPOR! application. At the top, there is a navigation bar with the LAPOR! logo, links for 'TENTANG LAPOR!' and 'STATISTIK', and buttons for 'MASUK' and 'DAFTAR'. The main banner features the text 'Anda juga bisa menyampaikan aspirasi melalui : CALL CENTER' followed by the phone number '08117905000' and 'atau Prefix SMS'. Below this, it says 'laporarinal (spasi) isi laporan kirim ke 1708' and 'Pemerintah Provinsi Lampung'. On the right side of the banner, there are portraits of 'Ir. H. Arinal Djunaidi' (Gubernur Lampung) and 'Hj. Chusnulha Chalim, M.Si' (Wakil Gubernur Lampung). At the bottom, there is a red button labeled 'Sampaikan Laporan Anda' and a section for 'PENILAIAN' (Rating) showing a 2.90 score with four stars.

Aplikasi Umum

Sudah ditetapkan oleh Kementerian PANRB

SRIKANDI
Sistem infoRmasi KeArsipaN Dinamisterintegrasi

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis

Belum diterapkan di Pemerintah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung masih menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Negara (SIKN)

*Akan segera diterapkan di provinsi Lampung, Koordinasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan ANRI

Aplikasi Umum yang akan ditetapkan Pemerintah Pusat

- Perencanaan
- Penganggaran
- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Akuntabilitas kinerja
- Pemantauan dan Evaluasi
- Kearsipan
- Kepegawaian
- Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 63
Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018

Aplikasi Khusus

Dibangun, dikembangkan, digunakan , dan dikelola oleh instansi pusat /pemerintah daerah tertentu sesuai dengan kebutuhannya dan bukan merupakan kebutuhan instansi pusat /pemerintah daerah lain

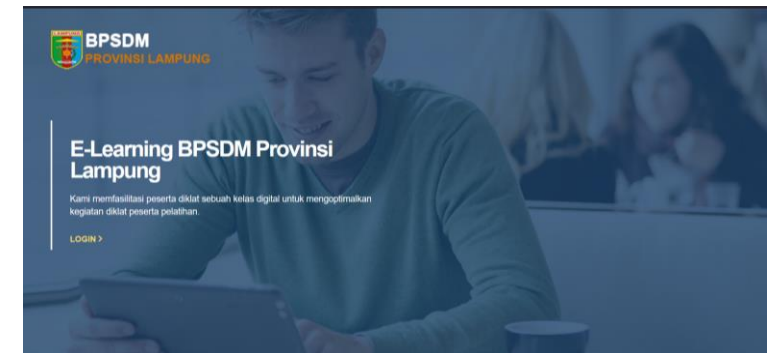
Beberapa aplikasi khusus di Pemprov Lampung

Si-Manja Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan

Siap-Diklat Sistem untuk pendaftaran calon peserta diklat

E-learning Kelas digital untuk mengoptimalkan kegiatan diklat peserta pelatihan

SIMKI Sistem Informasi Manajemen Keluhan Internet



Koordinasi dalam Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus

Sesuai Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 51 Tahun 2020

Seluruh Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus berkoordinasi dengan Diskominfo

Setiap aplikasi khusus yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus memiliki dokumentasi dan diserahkan kepada Diskominfo untuk pengarsipan dan proses integrasi

Indeks SPBE Provinsi Lampung Tahun 2020

Evaluasi SPBE

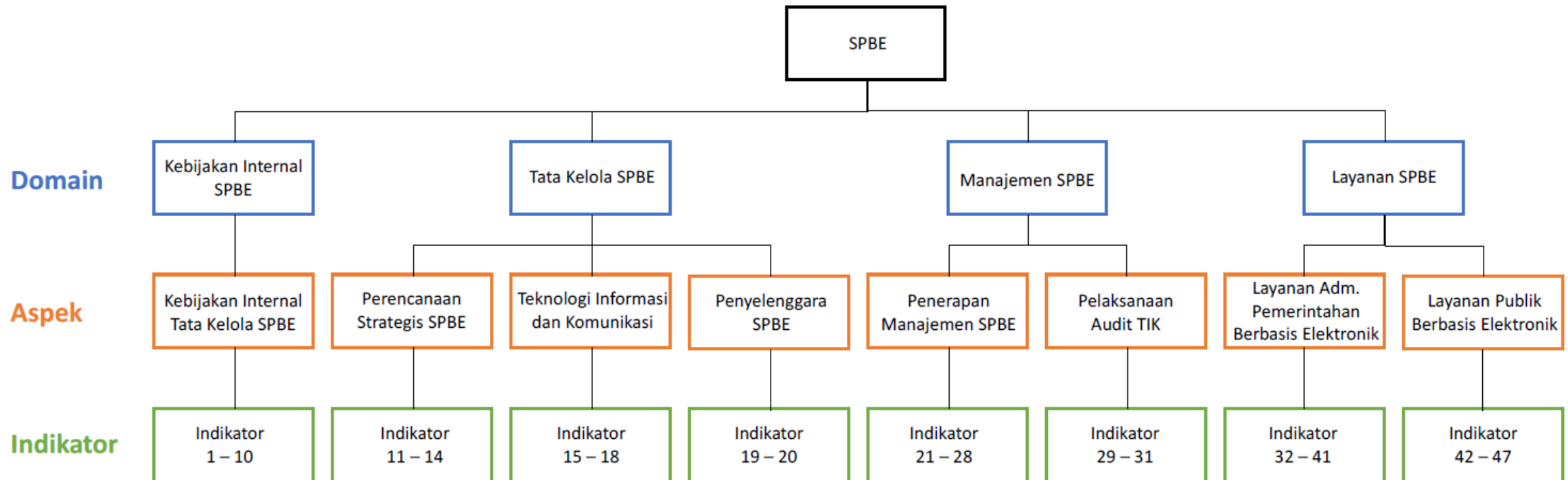
2,78
BAIK

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek		
<p>Aspek SPBE Target Aspek SPBE Indeks</p> <p>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</p> <p>Kebijakan Internal Layanan SPBE</p> <p>Kelembagaan</p> <p>Strategi dan Perencanaan</p> <p>Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>Layanan AdPem Berbasis Elektronik</p> <p>Layanan Publik Berbasis Elektronik</p>	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	2,78
	Domain Kebijakan Internal SPBE	3,18
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,71
	Kebijakan Internal Layanan SPBE	2,80
	Domain Tata Kelola SPBE	2,29
	Kelembagaan	2,50
	Strategi dan Perencanaan	3,00
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67
	Domain Layanan SPBE	2,91
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,86
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang **Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Evaluasi SPBE 2021

7 Pertanyaan Umum
47 Indikator Penilaian



Pengumpulan Dokumentasi SPBE

Berita Acara/Nota Dinas/ Laporan Evaluasi/ Notulensi Rapat/ Foto Rapat/ Daftar Hadir Rapat



Terima Kasih